



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Malinau, 27 Februari 1967, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di **Kabupaten Malinau**, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Malinau Seberang, 05 November 1966, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Malinau**, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 01 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 April 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Malinau Seberang selama 30 tahun di **Kabupaten Malinau**;



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. **Anak Pertama;**
 - 3.2. **Anak Kedua;**
 - 3.3. **Anak Ketiga;**
4. Bahwa sejak Maret tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan;
 - 5.1. Tergugat berselingkuh;
 - 5.2. Tergugat mengancam melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 5.3. Sering cekcok mulut;
6. Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas, sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak Desember 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau Nomor : xxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxx, atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, tanggal 06 Juli 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau, tanggal xxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe



nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 15 April 2021. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau, tanggal 19 Oktober 2021. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----Saksi:

1.-----**Saksi Pertama**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Malinau**, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di **Kabupaten Malinau** dan bersebelahan rumah dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa masalahnya adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengancam Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh);



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat pernah mengalami kecelakaan bersama perempuan tersebut dan keduanya sama-sama di rawat pada satu rumah sakit;
- Bahwa perempuan tersebut bernama panggilan **Selingkuhan**;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.- Saksi Kedua, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kontrak Daerah, bertempat tinggal di **Kabupaten Malinau**, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di **Kabupaten Malinau**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anak Pertama, Anak Kedua** dan **Anak Ketiga**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa masalahnya adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh) bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah serumah dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi juga pernah berkunjung ke tempat tinggal Tergugat dengan istri barunya tersebut;



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa sebelumnya saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah menghalangi Tergugat yang berniat melempar Penggugat dengan kursi plastik;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ**



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe



بَدَّعُواهُمْ، لَدَّعَى رَجَالُ أَمْوَالٍ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Malinau yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan **Tergugat** menikah dengan **Penggugat** pada tanggal 30 April 1990, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, maka asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas **Tergugat, Penggugat, Anak Kedua** dan **Anak Ketiga**. Maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sebagaimana bukti P.2 dan **Anak Kedua** serta **Anak Ketiga** adalah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan, keluarga tersebut berdomisili di **Kabupaten Malinau**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.4 adalah bukti yang sah. Bukti P.4 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.4 menerangkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dari pejabat yang berwenang untuk itu, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi I tinggal bertetangga/bersebelahan



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana saksi II yang merupakan menantu Penggugat dan Tergugat, saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anak Pertama**, **Anak Kedua** dan **Anak Ketiga**. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah keluarga dekan Penggugat, saksi I sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi II adalah menantu Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan sering melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan melihat langsung Tergugat mengancam Penggugat. keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang menerangkan bahwa saksi pernah menghalangi Tergugat ketika mau melempar Penggugat dengan kursi plastik, yang mana keterangannya berdasarkan penglihatan sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I menerangkan bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat pergi bersama perempuan lain, hal mana keterangannya dikuatkan pula oleh saksi II, masing-masing saksi memberikan keterangan berdasarkan penglihatannya sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh);

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali datang ke tempat kediaman bersama,



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi II yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anak Pertama**, **Anak Kedua** dan **Anak Ketiga**;
4. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh);
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus, yang disebabkan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh), hal tersebut diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggalnya



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

2. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

3. Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

”Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan“

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang dengan segala cara dan sekuat tenaga harus diusahakan untuk mempertahankannya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe



lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجِيَّةُ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ
وَكَانَ الْإِذَاءُ لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مِثْلِهَا وَعَجَزَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فَانِ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ لَا تَسْتَقِيمُ مَعَ الشَّقَاقِ وَالنِّزَاعِ عَدَامًا
فَبِذَلِكَ مِنْ ضَرْبِ بَالِغٍ بِتَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ وَسُلُوكِهِمْ وَلَاخِرَ فِي
اجْتِمَاعٍ بَيْنَ مِتْبَاعِضِينَ وَمَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا النِّزَاعِ خَطِيرًا
كَانَ أَوْ تَافَهَا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ
هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ لَعَلَّ اللَّهَ يَهَيِّئَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرِيكَاً آخَرَ
لِحَيَاتِهِ يَجِدُ مَعَهُ الطَّمَأَنِينَ وَالْإِسْتِقْرَارَ**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe



sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe



Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.TSe